

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Garner, Bryan . 2004. *Black,s Law Dictionary 8th Edition*. Paul : West Publishing
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- B. Ter Haar Bzn. 1980. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bott, Bruce dan Ruth Talbot-Stokes. 2010. *Names and Cross' Effective Legal Research, 4th Edition*. Australia : LexisNexis Butterworth.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, cet.III*. Bandung: Citra Aditya.
- Gautama, Sudargo. 1990. *Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke -19. Jakarta : Djambatan.
- HB. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta : UII Press.
- Kasim, Ifdal. 1996. *Tanah sebagai Komoditas : Kajian kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta : ELSAM.
- Lichfield, Nathaniel dan Haim Darim-Drabkin. 1980. *Land Policy in Planning*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- _____. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- _____. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

- Nur, Sri Susanti . 2010. *Urgensi Bank Tanah*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parlindungan, A.P. 1991. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Saidi, Zaim. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Santoso, Urip. 2009. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta : Kencana.
- _____. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta : Prenamedia Grup.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sumardjono, Maria SW. 2007. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Sutadi, Adrian. 2009. *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Zein, Ramli. 1995. *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal atau Karya Ilmiah

- Khasanah, Mulaelatul. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam*. Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekonomi dan Manajemen: Skripsi.
- Kusumawati, Tiara. 2010. *Tinjauan Yuridis Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A1975)*. Semarang : Skripsi Undip.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2001. *Penelitian Hukum, Yuridika (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya) Vol 16, No 1*.

Prasasi, Cindy Ayu. 2016. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*. Semarang : Skripsi Undip.

Sumyati. 2016. *Office Channeling Pasca Spin Off Bank BNI Syariah dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah*. Semarang : Undip.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria (PMA) No 9/1965 atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan Selanjutnya.